

Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Studi Pada Wilayah Gerbangkertosusila

Deftian Fitra Pradana

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: deftian.21023@mhs.unesa.ac.id

Risqi Noor Hidayati Putri

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: risqiputri@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila pada rentang tahun 2019 hingga 2023, yang terdiri atas empat komponen utama: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, keempat komponen PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Gerbangkertosusila. Temuan ini menunjukkan pentingnya optimalisasi PAD, khususnya pada komponen-komponen yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal daerah.

Kata Kunci : PAD, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD.

Abstract

This study aims to examine how Regional Original Income (PAD) affects economic growth in the Gerbangkertosusila region between 2019 and 2023, which consists of four main components: Regional Taxes, Regional Levies, Results from the Management of Separated Regional Assets, and Other Legitimate PAD. This study uses a quantitative approach with a panel data regression method using the Fixed Effect Model (FEM). The test results indicate that partially, Regional Taxes have a positive and significant effect on economic growth. Meanwhile, Regional Levies, Results from the Management of Separated Regional Assets, and Other Legitimate PAD have no significant effect on economic growth. Simultaneously, all four components of PAD have a significant effect on economic growth in the Gerbangkertosusila region. This finding demonstrates the importance of optimizing PAD, especially components that are proven to be able to drive economic growth, as a basis for regional fiscal policy making.

Keywords: Local Own Revenue (PAD), Economic Growth, Local Taxes, Local Levies, Asset Management, Other PAD

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya secara mandiri, baik dalam aspek keuangan maupun di luar aspek keuangan dalam bentuk otonomi daerah. Salah satu elemen kunci dari otonomi daerah yaitu penggunaan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan (Idham et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan tolak ukur utama dalam mempertimbangkan kesejahteraan suatu daerah, sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal tersebut. Di Indonesia, pemerintah daerah menggunakan pajak dan retribusi sebagai instrumen utama untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, pendapatan daerah juga bersumber dari keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, seperti melalui BUMD. Komponen lain dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencakup penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti sumbangan pihak ketiga dan pendapatan investasi, yang semakin memperkuat pendapatan daerah.

Untuk mendukung otonomi daerah dan pengelolaan keuangan lokal, berbagai kebijakan telah diperkuat dengan kerangka hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan pedoman yang jelas terkait tarif, subjek, dan objek pajak. Hal ini bertujuan meningkatkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola aset dan BUMD, yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal. Terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memperkuat tata kelola keuangan daerah, mendorong kemandirian fiskal, dan meningkatkan sinergi dalam perencanaan Pengelolaan keuangan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Semua aturan ini diharapkan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara lebih optimal, yang kemudian berujung akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Gerbangkertosusila, yang mempunyai potensi ekonomi besar di sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Wilayah Gerbangkertosusila, yang merupakan kawasan aglomerasi terdiri dari beberapa daerah yang saling terhubung dan memiliki interaksi ekonomi yang kuat, menjadi fokus penelitian ini karena dinamika pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Dalam periode tersebut, beberapa daerah seperti Surabaya dan Sidoarjo mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang tinggi, sementara daerah lain seperti Bangkalan mengalami kontraksi. Dengan adanya

konsentrasi kegiatan ekonomi dan populasi di Gerbangkertosusila, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara garis besar yang lebih jelas mengenai pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi. (Idham et al., 2021) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate. Hal ini sejalan dengan penelitian (Siregar, 2023) yang menunjukkan pengaruh positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil serupa. (Xuan et al., 2020) dalam studi desentralisasi fiskal di China menemukan bahwa pajak daerah justru berpengaruh negatif di beberapa wilayah, menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah sangat bergantung pada konteks daerah dan mekanisme desentralisasi fiskal yang diterapkan. Retribusi daerah juga berperan penting sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan layanan publik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Kusuma & Wirawati, 2013). Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tata kelola yang baik sebagai kunci keberhasilan (Rahmawati & Fauziah, 2020). (Putri et.al 2019) Pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah, dengan dominasi peran desentralisasi fiskal. Dalam hal ini, kontribusi PAD menjadi yang paling menonjol dibandingkan dengan fiskal transfer untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada tiga kerangka teori utama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi, teori desentralisasi fiskal, dan Wagner's Law. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Keynesian (Keynes, 1937), pertumbuhan ekonomi dipacu melalui peningkatan permintaan agregat, yang mencakup konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan eksport neto. Di antara komponen tersebut, pengeluaran pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan menjadi komponen vital dalam sumber dana untuk belanja pemerintah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik. Belanja pemerintah yang efektif dari PAD ini diharapkan mampu menciptakan efek multiplier, yaitu dampak berlipat terhadap pendapatan masyarakat dan konsumsi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan perkembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Teori desentralisasi fiskal menurut (Oates, 1972) menyatakan bahwa otonomi fiskal memungkinkan pemerintah daerah membuat keputusan pengelolaan keuangan yang lebih tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menjadikan PAD sebagai alat yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Sementara itu,

(Wagner, 1883) menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan. Dalam konteks ini, pertumbuhan PAD meningkatkan keleluasaan anggaran bagi pemerintah daerah untuk memperluas belanja pembangunan, sehingga memperkuat basis pertumbuhan ekonomi wilayah seperti kawasan Gerbangkertosusila.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dalam literatur yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya fokus pada satu atau dua komponen PAD, dan jarang yang menganalisis secara komprehensif pengaruh keempat komponen PAD secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian yang mengkaji kawasan metropolitan seperti Gerbangkertosusila yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota, dengan karakteristik ekonomi yang heterogen dan interkoneksi antar daerah, masih terbatas. Penelitian ini juga mencakup periode 2019-2023 yang meliputi masa pandemi Covid-19, memberikan konteks unik dalam menganalisis ketahanan fiskal dan dinamika pertumbuhan ekonomi dalam situasi krisis.

Artikel ini disusun secara sistematis, dimulai dengan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tinjauan literatur, kesenjangan penelitian, solusi yang ditawarkan, serta tujuan dan signifikansi penelitian. Bagian kedua menjelaskan metodologi penelitian, termasuk desain, data, lokasi, definisi variabel, teknik pengumpulan dan analisis data. Bagian ketiga menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, diikuti oleh kesimpulan yang merangkum temuan utama, kontribusi penelitian, implikasi kebijakan, keterbatasan, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dengan struktur ini, artikel ini tidak hanya menyajikan analisis empiris yang komprehensif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Alasan pemilihan pendekatan ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin meneliti sejauh mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila berdasarkan data numerik. Menurut Gujarati (2012), metode kuantitatif sangat sesuai untuk menguji hubungan antar variabel serta mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dianalisis secara netral dan berdasarkan fakta. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utamanya. Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah merupakan komponen dari variabel independen dalam studi ini, yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari sumber resmi, yaitu DJPK Kementerian Keuangan. Sedangkan variabel dependen,

yaitu pertumbuhan ekonomi, diukur menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, yaitu metode statistik yang menggabungkan dimensi *cross-section* dan *time series* dalam satu model analisis. Regresi data panel dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu serta variasi antar entitas secara lebih efisien dan akurat (Gujarati, 2012). Penggunaan metode regresi data panel ini dipilih karena mampu menggambarkan perubahan kondisi suatu daerah dari waktu ke waktu, sekaligus memungkinkan adanya perbandingan antar kabupaten/kota secara lebih menyeluruh dan mendalam. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1_{it} + \beta_2 X_2_{it} + \beta_3 X_3_{it} + \beta_4 X_4_{it} + \epsilon_{it}$$

Y_{it} = Pertumbuhan ekonomi

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi untuk variabel X1, X2, X3, dan X4

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

X4 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

ϵ_{it} = Error term

i = 7 Kabupaten/Kota

t = Periode 2019-2023

Studi ini menggunakan EViews 12 sebagai alat bantu dalam proses analisis data, dengan pemilihan model regresi yang tepat didasarkan pada hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penelitian dalam menggambarkan secara lebih mendalam mengenai pengaruh komponen-komponen PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi syarat kelayakan statistik (Gujarati, 2012). Dengan melewati tahapan-tahapan tersebut, studi ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan fiskal berbasis data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian Uji Chow Test diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Maka H_0 (*Common Effect Model*) ditolak dan dipilih *Fixed*

Effect Model. Selanjutnya, pada uji Hausman didapat p value $0,0139 < 0,05$, sehingga H_0 (*Random Effect Model*) juga ditolak dan kembali terpilih *Fixed Effect Model*. Karena kedua uji tersebut konsisten memilih *Fixed Effect Model*, sehingga *Fixed Effect Model* ditetapkan sebagai model akhir.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Metode	Prob
Uji Chow	0.0000
Uji Hausman	0.0139

Sumber: Hasil Analisa, diolah 2024

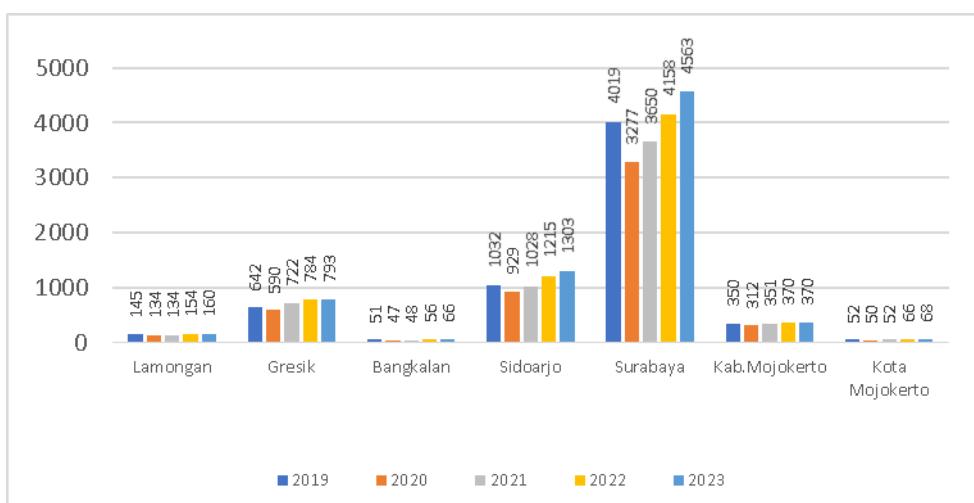
Sebelum melanjutkan ke analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengonfirmasi bahwa model regresi dinyatakan memenuhi kelayakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pertama, uji normalitas menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,374841, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal. Kedua, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana X1 memiliki nilai sebesar 1,110956, X2 sebesar 1,1775, X3 sebesar 1,130155, dan X4 sebesar 1,106178. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Ketiga, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk masing-masing variabel bebas adalah X1 = 0,3276, X2 = 0,7201, X3 = 0,1809, dan X4 = 0,5879, yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya seluruh uji asumsi klasik tersebut, model regresi yang digunakan dinyatakan valid dan mampu menghasilkan estimasi yang tidak bias. Berdasarkan hasil regresi, dari keempat variabel independen yang dianalisis, hanya satu variabel yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tiga variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menghasilkan bahwa kontribusi masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda-beda tingkat signifikansinya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing variabel akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	8.843446	0.433371	20.45337	0.0000
Pajak Daerah (X1)	0.337190	0.062802	5.369064	0.0000
Pajak Retribusi (X2)	-0.010992	0.046401	-0.236896	0.8147
Hasil Kekayaan yang dipisahkan (X3)	0.027072	0.018328	1.477078	0.1527
Lain-lain PAD yang sah (X4)	0.003304	0.045593	0.072467	0.9428

Sumber: Hasil Analisa, diolah 2024

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menunjukkan nilai koefisien Pajak Daerah sebesar 0,337190, dengan probabilitas (*p-value*) sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin besar penerimaan pajak daerah yang diperoleh, semakin meningkat pula aktivitas ekonomi di daerah. Hasil ini searah dengan hipotesis yang diajukan, yaitu bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis tersebut diterima. Dari sisi teori, hasil ini selaras dengan teori pertumbuhan ekonomi Keynesian, yang menekankan bahwa penerimaan pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti investasi infrastruktur, guna meningkatkan permintaan agregat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, teori desentralisasi fiskal Wallace E. Oates menyatakan bahwa otonomi fiskal memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan pajak yang sesuai karakteristik lokal, sehingga memaksimalkan efisiensi pemungutan dan alokasi pajak untuk kebutuhan pembangunan setempat. Terakhir, Wagner's Law menegaskan bahwa peningkatan pendapatan pajak mendorong kenaikan belanja publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memiliki efek multiplier dalam perekonomian regional. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menegaskan peran penting pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. (Lianda et al., 2021) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak daerah berperan penting dalam memperlancar pembangunan ekonomi melalui alokasi sumber daya yang efektif dan peningkatan pendapatan pemerintah serta masyarakat. Bukti empiris serupa juga diperkuat oleh penelitian (Idham et al., 2021) dan (Mina & Ratna, 2020) yang mengonfirmasi hubungan positif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Pajak Daerah di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2019-2023

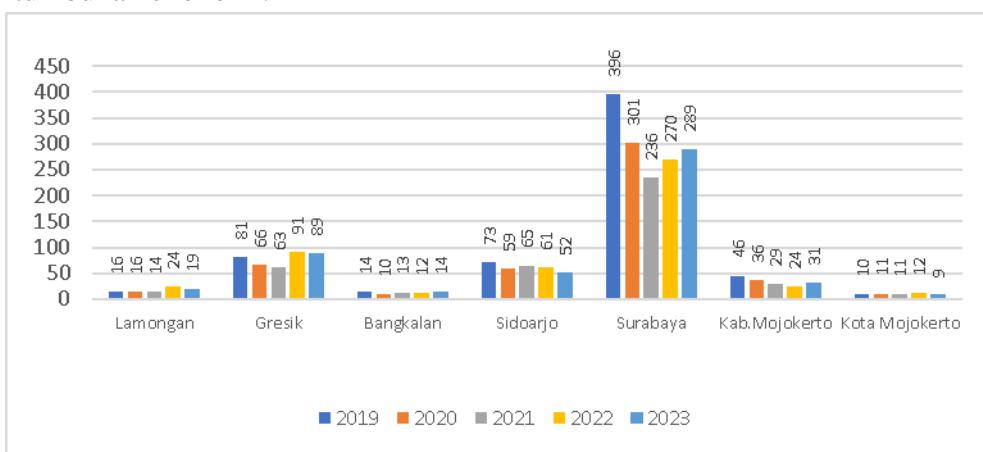
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2024

Terlihat pada Gambar 1 bahwa secara agregat penerimaan pajak daerah di wilayah Gerbangkertosusila mengalami tren kenaikan selama periode 2019–2023. Surabaya merupakan daerah dengan capaian penerimaan pajak daerah paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di wilayah Gerbangkertosusila, diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Peningkatan penerimaan pajak daerah ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah serta perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan daerah. Selain itu, tren kenaikan ini juga tidak lepas dari upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 yang sebelumnya sempat menekan aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak di tahun 2020. Seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial, kembalinya aktivitas usaha, serta normalisasi layanan pemerintahan, penerimaan pajak daerah mulai meningkat sejak tahun 2021 hingga 2023. Pemulihan ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong konsistensi pertumbuhan penerimaan pajak daerah di wilayah Gerbangkertosusila.

Variabel retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah mempunyai nilai koefisien sebesar $-0,010992$ dengan *p-value* sebesar $0,8147$. Karena nilai probabilitas tersebut jauh lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Gerbangkertosusila. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis tersebut ditolak. Secara teoritis, menurut teori desentralisasi fiskal Wallace E. Oates, retribusi daerah seharusnya berpotensi sebagai sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah karena lebih fleksibel dan langsung berkaitan dengan pelayanan publik yang diterima masyarakat. Namun

dalam konteks wilayah Gerbangkertosusila, hasil ini menunjukkan bahwa peran Retribusi Daerah masih belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah. Perlu dilakukan perbaikan dalam sistem penetapan tarif, peningkatan efisiensi pemungutan, dan optimalisasi potensi retribusi yang benar-benar produktif serta memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi terdahulu yang juga mengidentifikasi ketidaksignifikansi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. (Siregar, 2023) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah belum melaksanakan pemungutan secara maksimal, sehingga realisasi pendapatan retribusi daerah masih rendah dan perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tetap kecil. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. (Ramla Ilham Darise, 2022) serta (Lianda et al., 2021) menemukan kontribusi retribusi daerah terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2. Retribusi Daerah di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2019-2023

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2024

Selama lima tahun terakhir, penerimaan Retribusi Daerah di wilayah Gerbangkertosusila belum menunjukkan kinerja optimal dan cenderung stagnan, menunjukkan bahwa potensi retribusi belum tergarap maksimal oleh pemerintah daerah. Pemungutan retribusi masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun administratif yang membuat realisasi penerimaan dari retribusi relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan peran Retribusi Daerah sebagai salah satu komponen PAD masih terbatas dan mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi daerah masih belum optimal dalam memberikan pengaruh nyata pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.

Hubungan antara variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan analisis regresi,

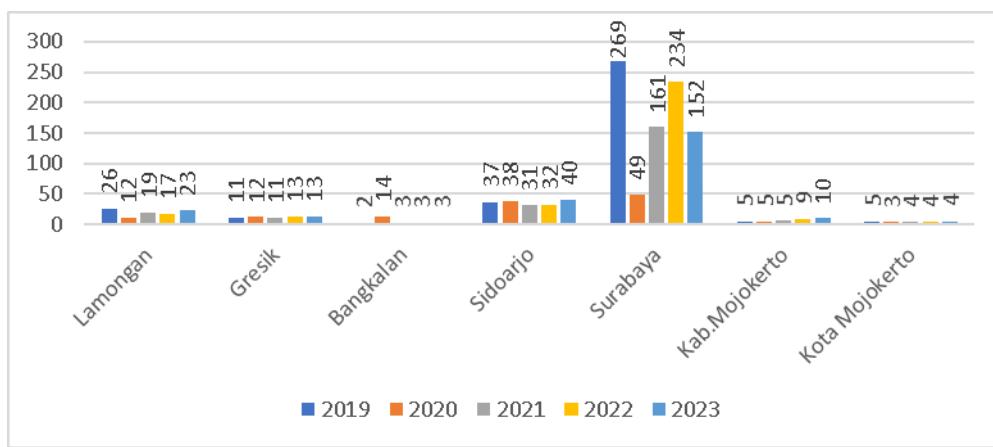
menghasilkan koefisien sebesar 0,027072 dan *p value* 0,1527, yang berarti pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Gerbangkertosusila. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan, bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis tersebut ditolak.

Temuan ini mengindikasi bahwa pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan belum mampu memberikan dorongan berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Gerbangkertosusila. Jika ditinjau dari perspektif teori pertumbuhan ekonomi Keynesian, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada besarnya permintaan agregat, di mana pengeluaran pemerintah menjadi faktor utama. Dalam hal ini, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seharusnya menjadi sumber pembiayaan belanja pemerintah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, nilai penerimaan dari komponen tersebut masih terlalu kecil untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga belum mampu menciptakan efek multiplier yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Sementara itu, menurut teori desentralisasi fiskal Wallace E. Oates, pemerintah daerah seharusnya mampu mengelola aset secara lebih efisien sesuai potensi lokal. Tingkat pendapatan yang rendah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengindikasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pada komponen ini belum sepenuhnya efektif. Kedua teori ini menjelaskan bahwa meskipun secara teori berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, implementasinya di wilayah Gerbangkertosusila masih belum efektif.

Temuan studi ini sejalan dengan studi terdahulu yang mengidentifikasi ketidaksignifikanan pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Nurjanna Ladjin et al., 2023) dan (Longa et al., 2024) menemukan bahwa kontribusi komponen PAD ini terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, terutama karena proporsinya yang kecil dalam struktur PAD secara keseluruhan. Namun, penelitian (Maghfira et al., 2023) menunjukkan hasil berbeda, di mana komponen ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan grafik terlihat bahwa penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di wilayah Gerbangkertosusila menggambarkan bahwa nilai penerimanya masih terbilang sangat kecil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah di wilayah Gerbangkertosusila masih belum optimal. Hasil ini menandakan bahwa aset-aset daerah, khususnya yang dikelola melalui penyertaan modal pemerintah daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), belum dimanfaatkan secara maksimal untuk

meningkatkan pendapatan dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. BUMD yang dimaksud meliputi PDAM, Bank Pembangunan Daerah (BPD), pasar, tempat hiburan, vila, hingga unit-unit usaha strategis lainnya. Keuntungan dari unit-unit ini seharusnya menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah. Gerbangkertosusila perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, melalui penguatan tata kelola BUMD, peningkatan profesionalisme, serta diversifikasi usaha, agar hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi regional.

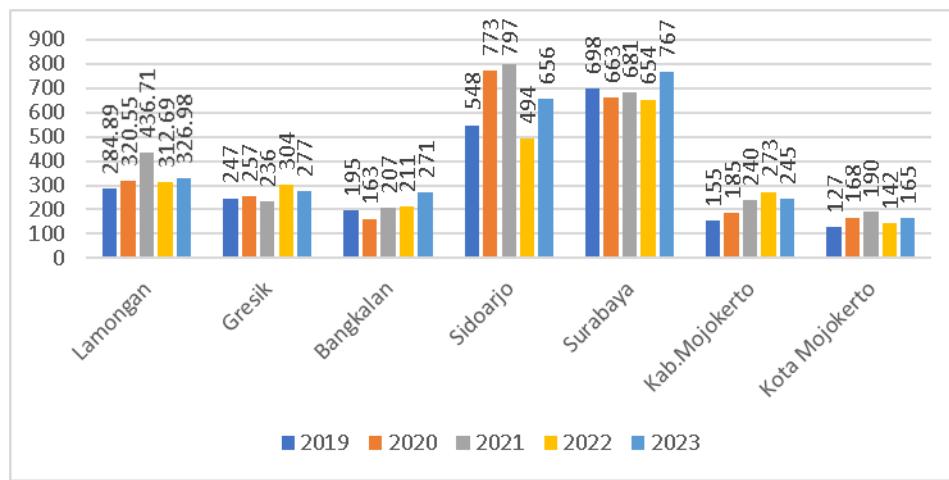


Gambar 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2019-2023
Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2024

Dari hasil estimasi regresi, diperoleh bahwa variabel Lain-lain PAD yang Sah memiliki koefisien sebesar 0,003304 dengan *p-value* 0,9428. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila tidak signifikan secara statistik. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis yang telah dirumuskan, bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis tersebut ditolak. Ditinjau dari perspektif teori pertumbuhan ekonomi Keynesian, pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan permintaan agregat, di mana pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi. Karena pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan pola fluktuatif dan perubahan yang relatif kecil dari tahun ke tahun, kontribusinya dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah menjadi terbatas. Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja produktif dan menciptakan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi juga belum optimal. Selain itu, menurut Wagner's Law, pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Namun, bila sumber penerimaan seperti Lain-lain

PAD tidak stabil, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja strategis di sektor publik juga terbatas, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak signifikan.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan temuan yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Misalnya, penelitian oleh (Nurjanna Ladjin et al., 2023) dan (Siri & Ridwan, 2022) menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, seperti yang dilakukan oleh (Ramla Ilham Darise, 2022) dan (Maghfira et al., 2023), yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Wilayah

Gerbangkertosusila Tahun 2019-2023

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2024

Berdasarkan Gambar 4 dapat ditinjau bahwa selama lima tahun terakhir penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di wilayah Gerbangkertosusila menunjukkan pola fluktuatif antar tahun dengan perubahan yang relatif kecil. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD di wilayah Gerbangkertosusila belum stabil dan belum menjadi sumber pendapatan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini mendukung hasil kajian yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap laju pertumbuhan ekonomi, karena perubahannya yang tidak konsisten. Meskipun komponen ini berpotensi mendukung pendapatan daerah, ketidakstabilan penerimaan antar tahun membatasi perannya sebagai sumber pendanaan strategis untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila.

Berdasarkan hasil analisis simultan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila periode 2019-2023. Nilai statistik F yang signifikan menunjukkan bahwa PAD merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun, efektivitas masing-masing komponen PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih bervariasi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila karena penerimaannya meningkat secara konsisten sepanjang periode penelitian. Di sisi lain, tiga komponen lainnya, yakni Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh stagnasi dalam penerimaan, nilai kontribusi yang relatif kecil, serta pola penerimaan yang fluktuatif dari waktu ke waktu. Walaupun begitu, secara simultan keempat komponen PAD tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, yang menegaskan bahwa optimalisasi seluruh sumber PAD menjadi faktor kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama, optimalisasi sistem administrasi pemungutan pajak perlu dilakukan melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasi, guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, meminimalkan potensi kehilangan pendapatan, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data fiskal. Kedua, kualitas pelayanan publik yang terkait dengan retribusi harus terus ditingkatkan agar dapat mendorong kepatuhan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan inovasi dalam layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, peningkatan peran dan profesionalisme BUMD menjadi penting dalam mengelola aset daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan revitalisasi aset-aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, agar dapat membuka peluang investasi baru dan meningkatkan kontribusi PAD terhadap perekonomian. Keempat, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem koordinasi yang lebih baik antar lembaga, khususnya dalam penyediaan data yang akurat dan komprehensif. Evaluasi kebijakan pengelolaan PAD secara berkala juga perlu dilakukan agar strategi yang diterapkan adaptif terhadap dinamika ekonomi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

REFERENSI

- Gujarati, D. N. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.

- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3).
- Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. *Quarterly Journal of Economics*, 51(2), 209–223. <https://doi.org/10.2307/1882087>
- Kusuma, M., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574–585.
- Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159.
- Longa, M. Y., Luciany, Y. P., & Djata, B. T. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagekeo Tahun 2014-2018. *JURNAL EQUILIBRIUM*, 1(2), 25–32. <https://doi.org/10.37478/jeq.v1i2.1814>
- Maghfira, L., Mardiana, A., & Syawaluddin, S. (2023). ANALISIS FAKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017-2021. *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 523–536. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.329>
- Mina, M., & Ratna, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39–51.
- Nurjanna Ladjin, Suwardi Zakaria, & Nur Mawati Mambuhu. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 10(3), 252–258. <https://doi.org/10.56338/jsm.v10i3.4404>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. *New York*, 1.
- Putri, R. N. H., Susilo, S., & Saputra, P. M. A. (2019). Decentralization and Financial Local Governments Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending, Economic Growth, and Poverty in East Java Indonesia? *Journal of Poverty, Investment and Development*. <https://doi.org/10.7176/JPID/51-04>
- Ramla Ilham Darise. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2019. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2293–2310. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.330>

- Siregar, S. A. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 194–204.
- Siri, A., & Ridwan, M. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 354–364.
- Wagner, A. (1883). *Finanzwissenschaft: in einzelnen selbständigen Abtheilungen. Einleitung, Ordnung der Finanzwirtschaft, Finanzbedarf, Privaterwerb* (Vol. 1). Winter.
- Xuan, R., Zhang, Y., & Li, X. (2020). Research on the Influence of Chinese Fiscal Decentralization on Regional Economy Against the Tax Distribution System. *5th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2019)*, 115–121.